

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Stabilitas sistem keuangan adalah kondisi pasar uang, pasar modal dan sistem perbankan berjalan dengan baik dengan risiko-risiko yang mempengaruhi dikelola secara efisien sehingga mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi. Manakala risiko yang terkait pada 3 sektor keuangan tersebut tidak dapat dikendalikan, maka terjadi ketidakstabilan dalam sistem keuangan. Krisis perekonomian yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 merupakan salah satu fenomena ketidakstabilan sistem keuangan yang berakibat pada tingginya tingkat inflasi dan suku bunga kredit, serta melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap kurs US \$.

Menurut Bank Indonesia, penyebab terjadinya krisis ini adalah adanya *twin crisis*, yakni krisis nilai tukar dan krisis perbankan. Di sisi nilai tukar, krisis terjadi karena penurunan nilai tukar yang sangat tajam sehingga menambah beban utang luar negeri jangka pendek yang didominasi oleh perusahaan swasta. Jumlah utang luar negeri swasta pada waktu itu menurut laporan Bank Indonesia adalah sekitar US \$ 33 Milliar yaitu setara dengan 1.5 kali jumlah cadangan devisa kotor (*gross international reserve*) Indonesia pada saat itu. Sementara, krisis disisi perbankan terjadi karena kinerja dan tata kelola yang buruk sehingga menyebabkan terjadinya *bank runs*, *bank closures*, *mergers*, *takeover* dan *bail out* oleh pemerintah dalam jumlah besar untuk bank atau sekelompok bank. (Bank Indonesia, 2007)

Dalam menanggulangi krisis nilai tukar, pemerintah membuat suatu kebijakan dengan memperlebar batas atas dan batas bawah (*band*) kurs Rupiah dari 8% menjadi 12%. Namun, upaya tersebut tidak mampu meredam spekulasi sehingga untuk menghindari pengikisan habis cadangan devisa yang dimiliki yang selanjutnya dapat membahayakan posisi negara pembayaran maka, pada pertengahan Agustus 2007 Bank Indonesia memutuskan untuk menghapus rentang intervensi dengan melepas *band* kurs Rupiah. Karena kebijakan tersebut, sejak saat itu Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang bebas (*free floating exchange rate*) yang berarti nilai kurs selanjutnya ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar.

Namun, kendati telah menempuh kebijakan melepas *band* kurs, kurs Rupiah tetap mengalami depresiasi dan semakin melemah terhadap nilai tukar mata uang US \$. Depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap US \$ mengakibatkan semakin tingginya permintaan jumlah uang beredar. Hal ini menimbulkan gejala perekonomian yakni meningkatnya laju inflasi yang diakibatkan oleh penurunan daya beli mata uang Rupiah (*the fall of purchasing power*). Karena kebijakan nilai tukar Rupiah yang telah diambil oleh Bank Indonesia tidak mampu meredam krisis, maka Bank Indonesia melakukan kebijakan uang ketat dengan menaikkan suku bunga SBI 1 bulan dari 11.625% menjadi 30% dan terus meningkat seiring gejala yang terjadi pada waktu itu.

Di bulan Agustus 1998, menurut laporan statistik Bank Indonesia, tingkat suku bunga SBI 1 bulan melambung tinggi hingga mencapai angka 70.44%. Tingkat suku bunga SBI yang cukup tinggi memicu peningkatan suku bunga Dana Pihak Ketiga bank konvensional. Pada saat tingkat suku bunga SBI 1 bulan mencapai angka 70.44%, tingkat suku bunga Dana Pihak Ketiga bank konvensional mencapai 67%. Kebijakan menaikkan suku bunga Dana Pihak Ketiga merupakan upaya dalam rangka mengurangi gejala *bank runs* yang dilakukan oleh masyarakat akibat ketidakpercayaan terhadap kinerja dan tata kelola sistem operasional perbankan.

Tingkat suku bunga Dana Pihak Ketiga yang cukup tinggi berarti juga kenaikan atas biaya operasional perbankan. Untuk mengurangi kerugian yang diderita dari sisi *liabilities* tersebut, bank konvensional kemudian berupaya meminimalisasi dengan meningkatkan suku bunga kredit. Tingginya suku bunga kredit memicu meningkatnya *Non Performing Loans* atau jumlah kredit bermasalah. Kinerja perbankan yang semakin memburuk akibat kondisi makroekonomi yang tidak kondusif mendorong pembuat kebijakan melakukan *merger* atau melikuidasi bank-bank konvensional yang ada pada saat itu.

Adalah Bank Muamalat Indonesia sebagai bank pertama murni syariah yang didirikan pada tahun 1992 merupakan salah satu bank yang terhindar dari upaya pemerintah dalam rangka melikuidasi bank-bank akibat kinerja yang memburuk seiring gejala perekonomian yang membawa krisis multidimensi pada tahun 1997. Bank Syariah adalah bank dengan tata kelola berdasarkan prinsip syariah Islam dimana sistem operasinya berbeda dengan bank konvensional. Dengan dipayungi oleh Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam UU No.10 Tahun 1998 serta UU No. 23 Tahun 1999 tentang Perbankan, operasional bank syariah merupakan sesuatu yang legal. Kendati belum memiliki undang-undang sistem perbankan syariah yang berdiri sendiri, dengan beroperasinya perbankan syariah sebagai salah satu pelaku ekonomi, maka sistem perbankan Indonesia menganut apa yang disebut dengan *dual banking system* atau sistem perbankan ganda yakni beroperasinya sistem perbankan konvensional berbasis sistem bunga (*interest rate system*) dan sistem perbankan Islam berbasis pada sistem bagi hasil (*profit loss sharing system*) dalam sistem ekonomi Indonesia secara beriringan.

Sejak dikeluarkan fatwa MUI No.01 tanggal 24 Januari 2004 mengenai pengharaman atas sistem bunga yang dijalankan oleh sistem perbankan, orang berbondong-bondong beralih ke bank syariah sebagai alternatif pilihan investasi yang bersifat *religious*. Sehingga, terjadi perubahan iklim pasar yang lebih bersifat *religi* dimana kaidah Islam dalam berbisnis mulai diperhitungkan.

Beranjak dari keinginan mengembangkan Perbankan Syariah yang sesuai dengan kaidah Islam, mulai bermunculan bank-bank syariah yang lain sehingga pada waktu itu bank syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Jumlah armada bank syariah semakin bertambah, tercatat pada akhir Agustus 2007 terdapat 3 Bank Umum Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia sebagai bank pertama murni syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia. Ditambah dengan 24 Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional serta 108 Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Namun, perkembangan bank syariah dalam kurun waktu 15 tahun terakhir ini (terhitung sejak tahun 1992 hingga tahun 2007) dinilai masih belum tercermin karena dalam kenyataan sampai saat ini pangsa pasar bank syariah belum signifikan. Padahal menurut survey referensi yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2000-2005 potensi pasar domestik bank syariah menunjukkan peluang pasar yang cukup besar ditambah dengan adanya dukungan perkembangan yang pesat dari perbankan dan keuangan syariah internasional.

Total Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun sampai dengan akhir Juli 2007 hanya sebesar IDR 23.232 miliar atau sekitar 1.68% dari total Dana Pihak Ketiga perbankan konvensional yang telah mencapai IDR 1.379.211 miliar. Salah satu penyebab rendahnya total Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun oleh Perbankan Syariah adalah karena asumsi rasional dari para nasabah terkait dengan variabel makroekonomi yang senantiasa membayangi sistem perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan Islam (syariah). Pada kenyataannya, tidak cukup hanya melalui legalitas Undang-Undang Perbankan dan keunggulan nilai-nilai moral semata Perbankan Syariah mampu berkembang, namun juga dibutuhkan efek pengungkit, yaitu adanya *market driven* yang besar.

Bank syariah dapat berkembang dengan baik bila mengacu pada *demand* masyarakat akan produk dan jasa Perbankan Syariah. Bukan hal yang dipungkiri bahwa sebagian besar nasabah bank syariah masih membandingkan tingkat pengembalian bagi hasil (*equivalent rate*) yang mungkin mereka terima dibandingkan dengan tingkat suku bunga Dana Pihak Ketiga bank konvensional. Sehingga, bisa dikatakan dalam lingkungan bisnis perbankan dimana diperankan sistem perbankan ganda (*dual banking system*) tingkat *equivalent rate* Perbankan Syariah akan terkait dengan tingkat suku bunga bank konvensional yang fluktuasinya seiring dengan laju peningkatan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang ditetapkan dalam rangka menjaga kestabilan makroekonomi dan moneter Indonesia.

Selain daripada tingkat suku bunga SBI, variabel makroekonomi lain yang akan mempengaruhi besarnya Dana Pihak Ketiga perbankan dalam sistem perbankan ganda (*dual banking system*) adalah tingkat inflasi dan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Inflasi yang tinggi menurunkan daya beli atas mata uang Rupiah sehingga, mendorong masyarakat menarik simpanan pada Dana Pihak Ketiga untuk kebutuhan konsumsi. Pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia, tingkat inflasi

mencapai 77.63%. Kendati telah berupaya meningkatkan suku bunga atas Dana Pihak Ketiga untuk mengurangi penarikan dana, *bank runs* dalam jumlah besar tetap saja terjadi. Kebijakan yang dilakukan dengan menaikkan suku bunga Dana Pihak Ketiga bank konvensional hingga mencapai 67% hanya menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja sistem perbankan.

Sementara itu, depresiasi nilai tukar mata uang asing mengakibatkan kerugian selisih kurs yang cukup besar bagi bank-bank yang menghimpun Dana Pihak Ketiga dalam mata uang asing terutama dalam US \$. Pada saat krisis ekonomi berlangsung, nilai tukar mata uang Rupiah terhadap US \$ terdepresiasi hingga menembus angka Rp. 17.000,- per 1 US \$. Bagi para nasabah yang menyimpan dananya dalam mata uang asing, depresiasi nilai tukar Rupiah ini merupakan keuntungan yang besar sehingga mendorong mereka melakukan penarikan dana untuk meraih keuntungan dengan beralih ke mata uang US \$. Dari sisi perbankan, depresiasi nilai tukar Rupiah ini mengakibatkan tingginya kewajiban yang berdampak pada kerugian akibat selisih kurs atau sebaliknya turunnya kinerja perbankan dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga.

Beranjak dari pemikiran bahwa nasabah bank syariah cenderung bersifat rasional terhadap besaran tingkat bunga, kemudian mengacu pada kondisi moneter yang terjadi ditahun-tahun sebelumnya, dapat dikatakan bahwa dalam sistem perbankan ganda (*dual banking system*) yang diterapkan oleh sistem perbankan Indonesia saat ini, kinerja penghimpunan Dana Pihak Ketiga bank syariah dipengaruhi oleh variabel makroekonomi yakni pergerakan suku bunga SBI, tingkat inflasi dan fluktuasi kurs US \$.

Karena peranan yang cukup penting dalam perekonomian, jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas sistem ekonomi. Kemampuan sistem Perbankan Syariah dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga menjadi andil dalam upaya menyerap jumlah uang beredar sehingga berpengaruh terhadap pengendalian inflasi. Disisi lain, upaya bank syariah dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga dalam mata uang US \$ menurunkan permintaan jumlah US \$ untuk kebutuhan transaksi. Kendati jumlah dana pihak ketiga Perbankan Syariah dalam mata uang US \$ masih relatif kecil, namun nilai ini akan mempengaruhi nilai tukar Rupiah terhadap US \$ karena penarikan dana bank untuk tujuan mengalihkan pada mata uang asing mengakibatkan timbulnya sentimen negatif terhadap mata uang Rupiah. Kondisi-kondisi fluktuasi makroekonomi tersebut diatas merupakan hal-hal yang melatarbelakangi setiap permasalahan dalam kajian penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Indonesia merupakan negara berpenduduk sekitar 200 juta jiwa dengan 80% penduduk beragama Islam. Kondisi ini merupakan potensi pangsa pasar domestik yang sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan bank syariah setelah beroperasi sejak 15 tahun yang lalu. Ditambah dengan dukungan perkembangan keuangan syariah internasional, peningkatan pangsa pasar bank syariah terhadap total bank secara nasional merupakan suatu peluang besar.

Kenyataan yang terjadi, justru kinerja Bank Syariah khususnya kinerja penghimpunan Dana Pihak Ketiga terlihat sedikit lamban walaupun pertumbuhan *asset* terus meningkat. Dilihat dari jumlah penghimpunan Dana Pihak Ketiga hingga bulan Juli 2007 hanya sebesar IDR 23.232 miliar atau sekitar 1.68% dari total Dana Pihak Ketiga perbankan konvensional.

Salah satu penyebab hal ini menurut penelitian sebelumnya adalah dikarenakan *demand* masyarakat terhadap produk dan jasa Perbankan Syariah yang tergolong masih rendah. Tidak menutup kemungkinan seorang nasabah bank syariah juga merangkap sebagai nasabah bank konvensional, sehingga sering kali membandingkan tingkat *equivalent rate* bank syariah terhadap suku bunga Dana Pihak Ketiga bank konvensional yang pergerakannya seiring dengan fluktuasi suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Rendahnya penghimpunan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi ekonomi negara. Pada tahun 1998 saat gejolak inflasi mencapai 77.40% dan suku bunga bank konvensional mencapai sebesar 67%, terjadi penarikan Dana Pihak Ketiga bank konvensional secara besar-besaran karena *real interest rate* pada saat itu hanya sebesar -10.40%. Jika *real interest rate* negatif berarti tingkat inflasi lebih tinggi daripada tingkat suku bunga Dana Pihak Ketiga bank

konvensional atau tingkat inflasi lebih tinggi daripada *equivalent rate* nasabah bank syariah. Dalam kondisi ini penarikan Dana Pihak Ketiga dalam jumlah besar sangat mungkin terjadi.

Karena inflasi menyebabkan penurunan daya beli uang (*the fall of purchasing power*), maka untuk mengkonsumsi barang yang sama diperlukan uang dalam jumlah yang lebih banyak disebabkan harga-harga yang cenderung meningkat. Apabila tingkat inflasi lebih tinggi daripada suku bunga bank atau tingkat pengembalian bank syariah, masyarakat akan cenderung melakukan konsumsi pada saat ini daripada menyimpan sejumlah dana di bank, karena nilai uang yang semakin menurun.

Begitu juga halnya dengan kurs US \$. Pada tahun yang sama, terjadi penarikan dana pihak ketiga US \$ bank konvensional dalam jumlah besar sehingga mengakibatkan terapresiasinya mata uang ini terhadap nilai tukar mata uang Rupiah. Penarikan ini mengindikasikan semakin besarnya permintaan valuta asing dalam bentuk US \$ sehingga menekan mata uang Rupiah pada nilai yang lebih rendah.

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah dalam kondisi lingkungan *dual banking system* yang diterapkan di Indonesia, fenomena masih rendahnya kinerja penghimpunan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah ditengah dukungan potensi pangsa pasar domestik dan internasional yang begitu besar, diakibatkan oleh pengaruh pergerakan suku bunga SBI, tingkat inflasi dan fluktuasi Kurs US \$.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dalam tesis ini disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. sejauh manakah tingkat suku bunga SBI 1 bulan mempengaruhi jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah?
- b. sejauh manakah tingkat inflasi ekonomi mempengaruhi jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah?
- c. sejauh manakah Nilai Tukar US \$ mempengaruhi jumlah Dana Pihak Ketiga (Rupiah) Perbankan Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian tesis ini antara lain adalah :

- a. Mengetahui besarnya pengaruh tingkat suku bunga SBI 1 bulan terhadap kinerja penghimpunan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah, sehingga dalam rangka upaya peningkatan pangsa pasar yang signifikan dan strategi peningkatan daya saing Perbankan Syariah terhadap perbankan konvensional dapat diambil suatu kebijakan yang tepat dalam hal penentuan besaran nisbah dan tingkat *equivalent rate* manakala fluktuasi suku bunga SBI melambung tinggi.
- b. Mengetahui besarnya pengaruh tingkat inflasi ekonomi terhadap kinerja penghimpunan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah sehingga pada kondisi inflasi ekonomi yang cukup tinggi Perbankan Syariah dapat menunjukkan *existensi*-nya dan tetap kokoh menjalankan fungsinya sebagai lembaga *intermediaries* dengan pemberian tingkat pengembalian yang sesuai sehingga menjadi alternatif investasi yang aman dimasa krisis. Disatu sisi dengan peranannya yang cukup signifikan sebagai lembaga *intermediaries*, dalam kondisi ini Perbankan Syariah menjalankan fungsinya dalam upaya menekan jumlah uang beredar masyarakat, sehingga besarnya fluktuasi inflasi ekonomi dapat ditangani sedini mungkin. Hal ini menunjukkan pentingnya perkembangan Perbankan Syariah dalam upaya pertumbuhan perekonomian dan kestabilan sistem keuangan Indonesia.
- c. Memastikan apakah jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah yang sebagian besar dalam mata uang Rupiah dipengaruhi oleh Nilai Tukar Mata Uang US \$.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Tesis ini hanya membahas pengaruh tingkat suku bunga SBI 1 bulan, tingkat Inflasi ekonomi dan Nilai Tukar Mata Uang US \$ terhadap kinerja penghimpunan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah. Variabel makroekonomi lainnya yang mungkin saja mempengaruhi tidak diperhitungkan dalam analisa ini.

- b. Data yang digunakan adalah jumlah Dana Pihak Ketiga, *Equivalent rate* Perbankan Syariah, tingkat suku bunga SBI 1 bulan, tingkat inflasi dan kurs US \$ untuk periode Maret 2004 sampai dengan Agustus 2007.
- c. Ukuran yang digunakan untuk menganalisa pengaruh SBI ialah *Net Equivalent rate*, sedangkan untuk tingkat inflasi ialah *Real Equivalent rate*. Sementara kinerja Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah diwakili oleh jumlah DPK yang terhimpun dalam kurun waktu penelitian dengan tingkat *equivalent rate* dari Deposito *Mudharabah*. Sebab, dari seluruh produk penghimpunan DPK Perbankan Syariah, produk Deposito *Mudharabah* memiliki jumlah yang cukup signifikan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Sesuai Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Syariah ialah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 10 tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Bank Syariah memiliki fungsi *intermediaries* sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat. Berdasarkan prinsip syariah, bank syariah menarik dana pihak ketiga dalam bentuk :

1. Titipan (*wadiah*) yaitu pinjaman yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*), tetapi tidak memperoleh imbalan atau keuntungan. Contoh daripada produk titipan *wadiah* adalah Giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* yang dapat diambil sewaktu-waktu.
2. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*non guaranteed deposit*), dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional yang didanai dengan modal tersebut (*mudharabah*). Contoh produk *mudharabah* ialah tabungan atau deposito yang diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu.

Jumlah Dana Pihak Ketiga yang berhasil terhimpun menentukan besarnya pangsa pasar Perbankan Syariah terhadap perbankan nasional. Dalam laporan perkembangan Perbankan Syariah tahun 2005 Bank Indonesia melaporkan bahwa kendala utama yang memicu lambatnya pertumbuhan bank syariah khususnya penurunan DPK Perbankan Syariah adalah tingginya suku bunga akibat kenaikan BI rate dalam rangka menjalankan kebijakan moneter uang ketat dan tingginya laju inflasi yang cukup signifikan. Sehingga, besarnya jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah merupakan fungsi linier dari variabel makroekonomi yaitu suku bunga SBI, tingkat inflasi dan kurs US \$, yang secara matematis dinotasikan sebagai berikut :

$$DPK = f \{ \alpha, \dots, \mu \} \dots\dots\dots(1.1)$$

$$DPK = f \{ \beta, \dots, \mu \} \dots\dots\dots(1.2)$$

$$DPK = f \{ \gamma, \dots, \mu \} \dots\dots\dots(1.3)$$

dimana ; DPK = Dana Pihak Ketiga

α = suku bunga SBI

β = laju inflasi

γ = kurs Rupiah terhadap US \$

μ = variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan.

Penjelasan masing-masing variabel sebagai berikut :

1. Suku bunga SBI

Penelitian Bank Indonesia mengenai pengaruh SBI terhadap suku bunga simpanan menyimpulkan bahwa apabila terjadi perubahan pada tingkat suku bunga SBI, maka bank-bank konvensional cenderung melakukan penyesuaian tingkat suku bunga deposito setelah 6.24 hari, tabungan setelah 14.05 hari, dan giro setelah 38 hari sejak terjadi perubahan. *Demand* masyarakat terhadap Dana Pihak Ketiga ditentukan oleh selisih antara *equivalent rate* bank syariah terhadap suku bunga SBI. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut :

$$NER = ER - SBI \dots\dots\dots(1.4)$$

Dimana :

NER : *Net Equivalent rate*

ER : *equivalent rate*

SBI : suku bunga SBI

Jika *equivalent rate* > suku bunga SBI maka nasabah bank syariah menerima tingkat pengembalian bagi hasil yang lebih tinggi dari pada suku bunga bank konvensional. Sebaliknya, jika *equivalent rate* < suku bunga SBI maka nasabah bank syariah menerima tingkat pengembalian bagi hasil yang lebih kecil daripada suku bunga bank konvensional. Menurut Bank Indonesia, *trend* meningkatnya suku bunga menyebabkan peningkatan risiko *displacement* (pengalihan dana dari bank syariah ke bank konvensional).

2. Inflasi ialah kenaikan harga barang/komoditas dan jasa dalam periode waktu tertentu. Menurut para ekonom, inflasi berupa kenaikan secara menyeluruh jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit perhitungan moneter) terhadap barang/komoditas dan jasa. Suku bunga nominal atau uang biasanya naik dalam masa inflasi, mencerminkan fakta daya beli uang menurun dengan naiknya harga. Untuk menghitung hasil bunga dalam pengertian barang dan jasa, digunakan suku bunga riil. Suku bunga riil setara dengan suku bunga nominal dikurangi dengan tingkat inflasi. Suku bunga merupakan instrumen konvensional untuk mengendalikan atau menekan laju pertumbuhan tingkat inflasi. Suku bunga yang tinggi akan mendorong orang untuk menanamkan dananya di bank daripada menginvestasikannya pada sektor produksi atau industri yang risikonya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan menanamkan uang di bank dalam bentuk deposito. (Tajul Khalwaty, hal. 143, 2004) Suku bunga yang tinggi menyedot jumlah uang yang beredar di masyarakat. Namun disisi lain, tingginya suku bunga akan meningkatkan nilai uang selain menyebabkan besarnya *opportunity cost* pada sektor industri dan sektor riil. Permintaan masyarakat terhadap produk Dana Pihak Ketiga yang ditawarkan oleh bank syariah terkait dengan inflasi tergantung pada besaran *real equivalent rate* dirumuskan sebagai berikut :

$$RER = ER - Inf.\dots\dots\dots(1.5)$$

Dimana :

RER : *Real Equivalent rate*

ER : *Equivalent rate*

Inf : Laju Inflasi

Jika *equivalent rate* > laju inflasi maka nasabah bank syariah menerima tingkat pengembalian bagi hasil yang lebih tinggi dari pada perubahan penurunan mata uang akibat laju inflasi. Sebaliknya, jika *equivalent rate* < laju inflasi maka nasabah bank syariah menerima tingkat pengembalian bagi hasil yang lebih kecil dari pada perubahan penurunan mata uang akibat laju inflasi. Pada kondisi ini penarikan dana untuk beralih ke mata uang yang lebih kuat sangat mungkin terjadi.

3. Kurs Rupiah terhadap US \$

Semakin pesatnya aliran uang dan modal dalam bentuk valas (*foreign currency*) untuk keperluan investasi, perdagangan dan spekulasi menimbulkan perbedaan kurs valas (*forex rate*) dimasing-masing negara. Perbedaan kurs valas pada masing-masing negara umumnya disebabkan oleh permintaan dan penawaran *foreign currency*, posisi saldo *Balance of Payment* (Neraca Pembayaran Internasional) masing-masing negara, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, tingkat pendapatan, efektivitas pengawasan otoritas moneter (pemerintah) serta ekspektasi dan spekulasi. (Tajul Khalwaty, hal. 225, 2004) Perbedaan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) terhadap mata uang asing (*foreign currency*) atau valuta asing (*foreign exchange*) secara otomatis berpengaruh pada kurs valas sebagai alat pembayaran internasional. Neraca Pembayaran Internasional (*Balance of Payment*) suatu negara menggambarkan secara sistematis seluruh transaksi selama jangka waktu tertentu yang meliputi perdagangan luar negeri (eksport dan import), keuangan serta lalu lintas moneter (transfer) antara penduduk suatu negara dengan negara lain. Neraca Pembayaran Internasional (*Balance of Payment*) suatu negara memiliki tiga kemungkinan yaitu (1) positif atau surplus, apabila jumlah valas yang diterima lebih besar daripada jumlah valas yang keluar sehingga terjadi penambahan jumlah cadangan devisa dalam negeri (2) negatif atau defisit, apabila jumlah valas yang keluar lebih besar daripada jumlah valas yang masuk ke dalam negeri sehingga terjadi kekurangan jumlah cadangan devisa dalam negeri, dan (3) equilibrium yaitu apabila jumlah valas yang diterima sama dengan jumlah valas yang keluar, sehingga tidak berpengaruh pada jumlah cadangan devisa negara. Dalam Neraca Pembayaran Internasional (*Balance of Payment*) yang terpenting diperhatikan adalah Posisi Saldo *Balance of Trade* (BOT) terutama pada posisi *current account* (neraca transaksi berjalan) dan posisi *capital account* (neraca modal). Pada *current account* akan terlihat perubahan (mutasi) cadangan devisa atau *forex* (dR) sebagai indikator jumlah valas yang diterima atau dimiliki oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu. Jika posisi cadangan devisa atau *forex* (dR) positif, berarti posisi Neraca Pembayaran Internasional (*Balance of Payment*) dalam keadaan surplus. Sebaliknya, jika posisi cadangan devisa atau *forex* (dR) negatif, berarti posisi Neraca Pembayaran Internasional (*Balance of Payment*) dalam keadaan defisit. Posisi dR positif atau negatif akan mempengaruhi kurs valas (*forex rate*) sebab cadangan devisa positif (+dR) akan menciptakan sentimen positif pada nilai mata uang domestik (*domestic currency*) sehingga nilai mata uang domestik akan menguat atau terapresiasi jika dibandingkan dengan kurs valas. Sebaliknya, cadangan devisa negatif (-dR) akan menciptakan sentimen negatif pada nilai mata uang domestik (*domestic currency*) sehingga nilai mata uang domestik akan melemah atau terdepresiasi jika dibandingkan dengan kurs valas, atau jika cadangan devisa equilibrium (+/- dR) mengindikasikan nilai mata uang domestik berada dalam posisi stabil terhadap kurs valas. Perdagangan valuta asing memiliki peranan yang cukup penting dalam pengelolaan likuiditas per mata uang asing bagi kalangan perbankan. Apabila kurs USD meningkat, maka akan terjadi penarikan Dana Pihak Ketiga dalam bentuk USD. Kondisi ini melemahkan nilai mata uang IDR akibat *demand* masyarakat yang tinggi terhadap USD. Sebaliknya, Dana pihak Ketiga dalam valuta asing akan meningkat apabila terjadi penurunan atas nilai kurs valuta bersangkutan.

Sehingga, fungsi permintaan linier jumlah Dana Pihak ketiga terhadap masing-masing variabel independen berubah menjadi sebagai berikut:

$$DPK = f \{ NERS, \dots, \mu \} \dots\dots\dots(1.6)$$

+

$$DPK = f \{ RER, \dots, \mu \} \dots\dots\dots(1.7)$$

+

$$DPK = f \{ ExR, \dots, \mu \} \dots\dots\dots(1.8)$$

-

Dimana ; DPK = Dana Pihak Ketiga

NER = *Net Equivalent rate*

RER = *Real Equivalent rate*

ExR = *Exchanged Rate* (Kurs US \$)

μ = variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan

Karena terdapat perbedaan satuan per hitungan antara beberapa variabel yang diteliti dimana jumlah DPK dan kurs US \$ dalam satuan nominal sementara variabel NER dan RER dalam satuan persentase, maka dalam penelitian ini digunakan model natural log untuk variabel jumlah DPK dan kurs US \$, sehingga model berubah menjadi :

$$\ln DPK = f \{ NERS, \dots, \mu \} \dots\dots\dots(1.9)$$

+

$$\ln DPK = f \{ RER, \dots, \mu \} \dots\dots\dots(1.10)$$

+

$$\ln DPK = f \{ \ln ExR, \dots, \mu \} \dots\dots\dots(1.11)$$

-

Dimana ;

$\ln DPK$ = Dana Pihak Ketiga

NER = *Net Equivalent rate*

RER = *Real Equivalent rate*

$\ln ExR$ = *Exchanged Rate* (Kurs US \$)

μ = variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan

1.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

1. Ho : pertumbuhan jumlah DPK Perbankan Syariah tidak dipengaruhi oleh *Net Equivalent rate*
Hi : pertumbuhan jumlah DPK Perbankan Syariah dipengaruhi oleh *Net Equivalent rate*
2. Ho: pertumbuhan jumlah DPK Perbankan Syariah tidak dipengaruhi oleh *Real interest rate*
Hi: pertumbuhan jumlah DPK Perbankan Syariah dipengaruhi oleh *Real interest rate*
3. Ho : pertumbuhan jumlah DPK Perbankan Syariah tidak dipengaruhi oleh kurs US \$
Hi : pertumbuhan jumlah DPK Perbankan Syariah dipengaruhi oleh kurs US \$

1.7 Metode Penelitian

Dalam melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan metode Pemodelan Regresi Linier Sederhana. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya multikolinieritas pada variabel independen apabila diteliti secara

bersama-sama. Efek multikolinieritas ini menyebabkan *spurious regression* atau regresi palsu, sehingga masing-masing variabel independen diuji secara sederhana terhadap variabel dependen dengan menggunakan metode regresi linier sederhana.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian, kerangka penelitian hipotesis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan literatur yang berisi teori-teori mengenai variable ekonomi makro dan pengaruhnya terhadap kinerja Perbankan Syariah. Serta penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan teori-teori tersebut.

Bab III metodologi penelitian, data yang digunakan, model ekonometrik, alat-alat uji hipotesis dan diagram analisis data.

Bab IV menyajikan analisis dan pembahasan hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dalam bentuk tabel, diagram, dan simulasi model.

Bab V berisi kesimpulan dan saran.

